

***PENERAPAN DEMOKRASI DI PEDESAAN
PADA MASA OTONOMI DAERAH
(Studi Analisis Pemilihan Kepala Desa Aek Bargot
Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas)**

TESIS

MULKAN LUBIS

19987



**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN IPS
PROGRAM PASCASARJANA (S-2)
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012**

ABSTRAK

Mulkan Lubis (2012) Penerapan Demokrasi di Pedesaan Pada Masa Otonomi Daerah (Studi Analisis Pemilihan Kepala Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan) Tesis Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang (UNP).

Studi ini berangkat dari rendahnya partisipasi politik masyarakat Desa Aek Bargot sebagai lokasi penelitian dalam hal Pilkades. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana penerapan proses partisipasi politik masyarakat dan rendahnya intensitas politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Aek Bargot dikaitkan dengan Otonomi Daerah dan demokrasi pedesaan. Desa Aek Bargot adalah salah satu desa di Kecamatan Sosopan yang melaksanakan Pilkades pada tanggal 30 Oktober 2008 dan dilanjutkan Pilkades ulang tanggal 14 Nopember 2008.

Penelitian dengan menggunakan metode observasi dan wawancara dengan Kepala Desa dan perangkatnya, Panitia Pilkades, tokoh masyarakat dan serta mempelajari berbagai dokumen di Kantor Camat Sosopan dan Kantor Kepala Desa Aek Bargot. Pemilihan responden menggunakan teknik bola salju (*snowball*). Analisis dilakukan dengan langkah: (1) pengumpulan data; (2) reduksi data; (3) penyajian data; (4) penarikan kesimpulan sesuai dengan teknis analisis data kualitatif model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992). Data diperiksa dengan melakukan perpanjangan keikutsertaan serta triangulasi, pengamatan yang lebih cermat dan diskusi teman sejawat.

Sesuai dengan hasil temuan peneliti partisipasi masyarakat dalam Pilkades adalah termasuk rendah. Rendahnya partisipasi masyarakat ditandai dengan sulitnya mencari calon Kepala Desa serta peserta pemilih tidak mencapai 2/3 dari jumlah pemilih terdaftar. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa rasa primordialisme kesukuan masih berakar dan kental di Desa Aek Bargot. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilkades Aek Bargot disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat atas hak dan kewajibannya, rendahnya kesadaran politik masyarakat disamping karena faktor kemiskinan yang mengakibatkan penduduk lebih terfokus pada pencarian nafkah mereka.

ABSTRACT

Mulkan Lubis (2012) Application of Rural Democracy in the Period of local Autonomy (Study of Village Chief Election on District Aek Bargot muniapolicy of Sosopan District of Padang Lawas) Magister of education Thesis In Padang State University.

This study build on low of political participation of village communities Aek Bargot as a research location. This study aims to reveal how the implementation of the chief election (Pilkades) in the village of Aek Bargot associated with regional autonomy and village democracy. Aek Bargot village is one of the villages in the district of Sosopan that implements Pilkades on October 30, 2008 and re Pilkades November 14, 2008.

Research methods using observational methods, including interviews with chief, Pilkades committee, community leaders and village residents (voters) and study the various documents in the Office of the Chief of the Village Sosopan Aek Bargot. Responder determined on using snowball methods. Data was analyzed using qualitative technical analysis of qualitative, interactive models proposed by Miles and Huberman (1992) which consists of data collection, data display, and drawing conclusions. Data checked by performing an extension of the participation, triangulation, more careful observation and peer- discussion.

According to research findings that people's participation in Pilkades is relatively low. Some examples of low participation are the difficulty of finding candidates for chief, the participant voter does not reach 2/3 of the number of registered voters. The results also indicate that the sense of primordial still rooted in the village of Aek Bargot thickly. Furthermore, it can be concluded that the low participation on Aek Bargot Pilkades due to lack of public awareness of their rights and obligations as well as the lack of political awareness and the poverty factor make them more fows on working.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Tesis dengan judul Penerapan Demokrasi Di Pedesaan Dalam Masa Otonomi Daerah (Studi Analisis Pemilihan Kepala Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan) adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Negeri Padang (UNP) maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, Juni 2012
Saya yang Menyatakan

MULKAN LUBIS
19987

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT atas berkat dan Rahmat-Nya penulisan Tesis berjudul “Penerapan Demokrasi Di Pedesaan Dalam Masa Otonomi Daerah (Studi Analisis Pemilihan Kepala Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan)” dapat terselesaikan dengan baik. Tesis ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mendapatkan gelar Magister Pendidikan Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial dengan konsentrasi Pendidikan Kewarganegaraan pada Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang (UNP).

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini banyak mendapat sumbangan dan bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Atas semua itu sudah sepantasnya penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. H. Siti Fatimah M.Pd, M.Hum, selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Afriva Khaidir, MAPA., Ph.D, selaku pembimbing II, dosen Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. Azwar Ananda, M.A, Bapak Prof. Dr. Eddy Marheni, M.Pd dan Ibu Dra. Hj. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D sebagai Dosen Penguji dan Dosen Program Pasca Sarjana yang telah banyak memberikan saran dan kritikan dalam perbaikan tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. Mukhaiyar M.Pd selaku Direktur Program Pasca Sarjana (PPS) Universitas Negeri Padang (UNP), Bapak Prof. Dr. Gusril M.Pd selaku Asisten Direktur I dan Bapak Prof. Dr. Rusdinal selaku Asisten Direktur II serta segenap staf pegawai Program Pasca Sarjana (PPS) Universitas Negeri Padang (UNP) yang telah banyak memberikan kemudahan dan fasilitas selama mengikuti pendidikan

4. Bapak dan Ibu Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama mengikuti pendidikan
5. Seluruh Informan yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, Panitia Pilkades, Tokoh Masyarakat, Pengetua Adat dan Alim Ulama Desa Aek Bargot yang telah membantu maupun masyarakat umum yang telah meluangkan waktunya kepada penulis.
6. Ucapan sama juga penulis sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa PPS UNP, teristimewa sekali rekan Program Studi IPS konsentrasi Pendidikan Kewarganegaraan Angkatan 2010/2011 yang telah memberikan motivasi dan bantuannya dalam penyelesaian studi ini
7. Teristimewa untuk kedua istriku tercinta Nurlohot Hasibuan dan Mastiana beserta anak-anakku yang dengan penuh kesabaran memberikan dorongan dan pengertian selama mengikuti pendidikan di Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang.
8. Tak lupa penulis ucapkan terimakasih tak terhingga untuk kedua orang tuaku tercinta, abang, kakak dan adekku serta kedua mertuaku, terimakasih atas segalanya.

Akhirnya penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan, oleh karenanya dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari semua pihak demi perbaikan tesis ini. Mudah-mudahan tesis ini ada manfaatnya di kemudian hari. Amin ya robbal Alamin.

Padang, Juni 2012
Penulis

H.MULKAN LUBIS
NIM. 19987

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan Penelitian	6
C. Fokus Penelitian	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Kajian Teori	8
1. Demokrasi dan Perilaku Demokrasi.....	9
2. Demokrasi Lokal dan Demokrasi Desa	26
3. Implementasi Demokrasi di Tingkat Desa	28
B. Ketentuan tentang Desa dan Pemilihan Kepala Desa	37
C. Penelitian Yang Relevan	48
D. Kerangka Konseptual	51
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian	52
B. Lokasi Penelitian	52
C. Teknik Menetapkan Informan.....	53
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	53
E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	54
F. Teknik Analisis Data	55
BAB IV TEMUAN UMUM DAN PEMBAHASAN	58

A. Temuan Umum	58
1. Kondisi Historis	60
2. Kondisi Geografis	60
3. Sarana dan Prasarana Desa	65
4. Agama dan Adat Istiadat	67
5. Sistem Budaya	67
B. Temuan Khusus	71
1. Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkadaes di Desa Aek Bargot	71
2. Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Politik	84
C. Pembahasan dan Analisis	99
BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	121
C. Implikasi Penelitian	121
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin
Desa Aek Bargot 62
2. Tabel 2 : Jumlah Rumah Tangga Penduduk dan Kepadatan Penduduk Desa
Aek Bargot Tahun 2000, 2005, 2010 dan 2012 63
3. Tabel 3 : Mata Pencaharian Penduduk desa Aek Bargot 64
4. Tabel 4 : Tingkat Pendidikan Formal di Desa Aek Bargot 65

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1	: Hierarki Partisipasi Politik	22
2. Gambar 2	: Kemaslahatan Model Liberal	23
3. Gambar 3	: Skema Kerangka Konseptual	51

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Surat Permohonan Pilkades Warga Masyarakat desa Aek Bargot Kepada Bupati Padang Lawas.
2. Lampiran 2 : Surat Permohonan Pilkades Warga Masyarakat desa Aek Bargot Kepada Camat Sosopan.
3. Lampiran 3 : Keputusan Bupati Padang Lawas Tentang Pengesahan Badan Perwakilan Desa (BPD) di Desa Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.
4. Lampiran 4 : Keputusan Bupati Padang Lawas Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Aek Bargot Kecamatan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.
5. Lampiran 5 : Surat Panitia Pilkades Aek Bargot Tentang laporan Pendaftar Balon Kades.
6. Lampiran 6 : Surat Pelaksanaan Pilkades Aek Bargot Kecamatan Sosopan.
7. Lampiran 7 : Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara
8. Lampiran 8 : Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa I
9. Lampiran 9 : Surat Bupati Padang Lawas Kepada Camat Sosopan Tentang Pelaksanaan Pemilihan Ulang.
10. Lampiran 10 : Berita Acara Perhitungan Pemilihan Kepala Desa
11. Lampiran 11 : Surat Camat Sosopan Kepada Bupati Tentang Hasil Pilkades Ulang Desa Aek Bargot
12. Lampiran 12 : Surat Keterangan Kepala Desa Tentang Izin Penelitian
13. Lampiran 13 : Surat Keterangan Camat Sosopan Tentang Izin Penelitian
14. Lampiran 14 : Foto-foto Desa Aek Bargot dan PETA Padang Lawas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi merupakan suatu proses menuju kepada suatu bentuk sistem politik yang demokratis yang didasarkan atas kebebasan, persamaan, dan partisipasi politik. Demokrasi artinya dari pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal ini menunjukkan peranan dan partisipasi aktif rakyat dalam pelaksanaan pemerintahan demokrasi yang merupakan wujud pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi (Suardi Abubakar, dkk, 2005: 91). Sistem politik demokrasi didasarkan pada nilai, prinsip prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Sistem politik demokrasi diyakini mampu menjamin hak kebebasan warga negara, membatasi kekuasaan pemerintahan dan memberikan keadilan. Banyak negara menghendaki sistem politiknya adalah sistem politik demokrasi (Samuel Huntington, 2001: 26).

Secara general demokrasi dapat dipandang sebagai suatu ide tentang tatanan kehidupan berpolitik (Mayo H.B, 2006: 30). Ide demokrasi ini disandarkan kepada kebebasan, kebijaksanaan dan kehendak rakyat banyak yang diletakkan sebagai alat ukur politik. Hatta (1969: 15) menganggap dan percaya bahwa demokrasi/kerakyatan dan kebangsaan sangat cocok untuk keperluan pergerakan Indonesia di masa datang. Dengan demikian demokrasi mempunyai potensi untuk memberikan yang terbaik dan terbaik bagi manusia terutama dalam melindungi hak-hak

individu dalam menghadapi kekuasaan yang perkasa, seperti kekuasaan negara dan pemerintah misalnya.

Sejak dahulu Bangsa Indonesia telah mempraktekkan ide tentang demokrasi meskipun masih sederhana dan bukan dalam tingkat kenegaraan tetapi ditingkat bawah. Bangsa Indonesia telah berdemokrasi tetapi masih di tingkat atas. Menurut Moh. Hatta dalam Padmoe Wahyono (1990: 45) di desa-desa Indonesia sudah menjalankan demokrasi, misalnya dengan pemilihan Kepala Desa, dan adanya rembuk Desa, itulah yang dimaksud dengan demokrasi.

Demokrasi lokal merupakan bagian dari subsistem politik suatu Negara yang derajat pengaruhnya berada dalam koridor Pemerintahan Daerah. Di Indonesia demokrasi lokal merupakan subsistem dari demokrasi yang memberikan peluang bagi Pemerintahan Daerah dalam pengembangan kehidupan hubungan Pemerintahan Daerah dengan rakyat di lingkungannya.

Semenjak era reformasi, demokrasi yang diusung mengarah pada demokrasi langsung, salah satunya karena banyak pejabat politik yang tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga legitimasi mereka lemah. Di sisi lain memunculkan ketidakpercayaan rakyat pada penguasa, mendorong rekrutmen pejabat politik ke arah demokrasi langsung, sehingga tidak mengherankan bila rekrutmen hampir semua jabatan politik dilaksanakan dalam format demokrasi yang bergerak pada hubungan *state* dan *society* secara langsung. Mulai dari pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD. Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan umum

presiden dan wakil presiden. Pada fase demokrasi langsung ini merupakan era baru reformasi politik di Indonesia yang pertama kali digelar sejak kemedekaan Indonesia.

Dari sisi kedaulatan rakyat daerah, demokrasi lokal dibangun untuk memberikan porsi yang seharusnya diperoleh rakyat lokal dalam pemberian legitimasi pada elit eksekutifnya. Selama ini rakyat daerah memberikan kedaulatan hanya pada legislatif daerah saja melalui pemilu legislatif. Maka merujuk pada konsep *trias politica* Montesquie, pemisahan kekuasaan atas tiga lembaga Negara untuk konteks Pemerintahan Daerah terletak pada lembaga eksekutif dan legislatif daerah, sedangkan dalam kerangka yudikatif menginduk pada kelembagaan pusat (Dahlan Thaib, 2008: 75).

Salah satu bentuk demokrasi di tingkat Desa yaitu pemilihan Kepala Desa yang merupakan wujud dari pelaksanaan demokrasi. Sesuai dengan Pasal 202 dan 209 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa dimana di desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD). Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat. Calon Kepala Desa yang terpilih dengan mendapatkan dukungan suara terbanyak ditetapkan oleh BPD dan disahkan oleh Bupati (Darma Setiawan salam, 2002: 191).

Seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya tercakup peraturan tentang Desa, maka mulai muncul harapan bahwa Desa didudukkan posisinya

sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak dan asal usul dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Sebelum otonomi daerah yang pelaksanaannya dimulai 1 Januari 2001, corak pemerintahan yang sentralistik dimana kewenangan dan pengelolaan segala sektor pembangunan berada dalam kewenangan pemerintah pusat. Demikian juga dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Kepala Desa (Pilkades) sangat kuat campur tangan pusat. Selanjutnya sebelum otonomi daerah tidak ada Badan Perwakilan Desa (BPD). Dimana yang saat itu adalah Panitia yang dibentuk kecamatan. Penjaringan calon Kepala Desa dilakukan Panitia Kecamatan dan pelantikan dilakukan Bupati atas usul Pemerintah Kecamatan sebagaimana di atur dalam UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Sedangkan sesudah otonomi daerah yaitu setelah tahun 2001 maka dibentuk Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai penyelenggara Pilkades mulai dari penjaringan, pendaftaran dan pemilihan Kepala Desa. Selanjutnya pelantikan Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atas usul BPD.

Sebagai wadah untuk menampung aspirasi politik masyarakat sekaligus sarana pergantian atau kelanjutan pemerintahan desa Pilkades diharapkan mampu memenuhi keinginan dan harapan masyarakat desa tertentu, untuk mengangkat calon yang layak sebagai Kepala Desa. Pilkades merupakan sebuah instrumen dalam pembentukan pemerintahan modern dan demokratis. Pesta demokrasi yang dilakukan di tingkat

wilayah terkecil ini pada dasarnya sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan pemerintah tentang tata cara penyelenggaraan Pilkades.

Namun dalam prakteknya Pilkades yang sudah diatur oleh perundang-undangan pemerintah untuk saat ini sangat sulit terselenggara dengan lancar dan berkualitas karena bermainnya faktor-faktor kepentingan politik, dan kepentingan untuk ingin berebut kekuasaan ketimbang hakikat yang diingini oleh Pilkades yaitu pemerintahan desa.

Disamping itu penyelenggaraan Pilkades juga tidak terlepas dari pengaruh kebudayaan-masyarakat desa. Sehingga sering kali budaya sangat berperan didalamnya. Seiring dengan hal ini didalam pelaksanaan Pilkades tidak jarang menuai kericuhan dan konflik. Di dalam penyelenggaraan pesta demokrasi ini terdapat banyak masalah dan persoalan sebagai gejala awal konflik Pilkades yang diwarnai dengan kericuhan, kekerasan, yang dapat merusak keutuhan dan eksistensi masyarakatnya. Situasi yang memprihatinkan ini tidak jarang lagi terjadi di berbagai daerah desa yang terdapat di Tanah Air Indonesia.

Fenomena seperti di atas juga terjadi di aek Bargot, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, dimana proses pelaksanaan Pilkades diwarnai dengan persaingan tidak sehat, kericuhan, kekerasan yang akhirnya menuai konflik. Kultur *si Pukka Huta* sebagai sebuah keharusan yang tidak tertulis untuk menjadi pemimpin atau kepala desa pada akhirnya menimbulkan kurangnya apresiasi terhadap pemilihan kepala desa oleh masyarakat, apalagi dari *out group* memunculkan resistensi

untuk tidak berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa. Inilah yang menjadi dasar bagi peneliti untuk mengungkapkan fenomena di atas.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka penulis akan membatasi masalah pada hubungan partisipasi politik masyarakat dalam Pilkades dengan demokrasi Desa. Dengan demikian dalam membahas hubungan antara partisipasi masyarakat dalam Pilkades dikaitkan dengan demokrasi Desa atau lokal, maka penulis mendeskripsikan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan proses partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan Tahun 2008?
2. Mengapa intensitas partisipasi politik masyarakat rendah di Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan dalam Pilkades Tahun 2008?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada bentuk partisipasi politik dalam proses pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Aek Bargot Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas dalam penerapan demokrasi di pedesaan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas yang menjadi tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan proses partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan Tahun 2008.
2. Untuk mengetahui mengapa intensitas partisipasi politik masyarakat rendah di Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan dalam Pilkades Tahun 2008.

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis sebagai kajian ilmiah bagi peneliti sendiri dalam bidang Pendidikan Kewarganegaraan yang berkaitan dengan penerapan demokrasi di Desa.
2. Secara Praktis:
 - a. Sebagai bahan masukan bagi yang ingin memahami proses Pemilihan Kepala Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.
 - b. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian bagi penelitian lain dalam mengembangkan partisipasi politik masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

C. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan, temuan hasil penelitian yang dipaparkan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan:

1. Bentuk proses partisipasi politik dalam demokrasi lokal melalui Pilkades Tahun 2008 di Desa Aek Bargot Kecamatan ditemukan sebagai berikut:
 - a). Tahap pelaksanaan pendaftaran Pemilihan Kepala Desa mulai dari pencalonan yang terkesan alot dan sering tertunda-tunda dan diperpanjang menunjukkan rendahnya partisipasi aktif sebagai calon dan partisipasi pasif sebagai pemilih sama-sama rendah.
 - b). Pemilihan Kepala Desa diulang karena rendahnya partisipasi masyarakat, pemilihan pertama dilaksanakan tanggal 30 Maret 2008. Dinyatakan batal karena tidak mencapai 2/3 dari jumlah pemilih sesuai surat Bupati Padang Lawas Nomor 141/3862/2008 tentang pelaksanaan pemilihan ulang yang harus 7 (tujuh) hari kemudian.

- c). Pemilihan ulang dilaksanakan tanggal 13 November 2008 dengan perhitungan jumlah pemilih 435 orang; jumlah pemilih yang hadir 249 orang; jumlah tidak hadir 186 orang. Dalam Pilkades I Ali Daud memperoleh suara 121 orang dan Muhluddin Hasibuan 76 suara. Sedangkan dalam Pilkades ulang, Ali Daud memperoleh suara 170 suar¹¹⁹ hluddin 57 suara.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya intensitas partisipasi politik masyarakat Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan adalah:
- a). Sebahagian masyarakat menganggap Pilkades hanyalah merupakan kepentingan pemerintah termasuk masalah Pemilihan Kepala Desa. Disamping itu masyarakat berkeyakinan bahwa siapapun yang terpilih menjadi Kepala Desa tidak ada yang mementingkan rakyatnya tidak akan ada perubahan nasib masyarakat.
 - b). Menurut pengalaman masa lalu bahwa yang akan terpilih Kepala Desa tetap dari marga/suku Nasution walaupun diadakan pemilihan, kemudian masih kentalnya sikap egosentrisme kesukuan menyebabkan marga/suku kecil tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam Pilkades.
 - c). Masih terdapat warga desa yang tinggal di ladang dan kebun dan tidak rela meluangkan waktu untuk memberikan suara dalam Pilkades.
 - d). Ekonomi masyarakat masih tergolong rendah sehingga sibuk menutupi kebutuhan keluarga dan hal ini berpengaruh pada sikap apatis warga dalam ajang pemilihan.
 - e). Masih ada masyarakat yang kurang faham tentang hak dan kewajibannya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan keluarganya. Disamping itu kurangnya sosialisasi tata cara Pemilihan Kepala Desa terhadap warga desa dan ada sebahagian masyarakat tidak mendapat

undangan untuk memilih serta ditemukan suara-suara yang tidak bertanggungjawab (gossip) mengajak warga desa untuk tidak ikut memilih dalam Pilkades.

D. Implikasi Penelitian

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan di atas apabila pemerintahan desa memiliki kepemimpinan yang demokratis dan partisipatif maka akan mendorong warga desa berpartisipasi dalam setiap kegiatan desa, termasuk Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Disamping itu pendidikan politik sangat urgen untuk masyarakat desa sehingga muncul sikap kemandirian, bertanggungjawab, sadar hak dan kewajiban sebagai warga negara yang berdedikasi tinggi dan peduli sesama sesuai dengan yang diharapkan oleh Pendidikan kewarganegaraan.

E. Saran

1. Perlu upaya mencari solusi bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat.
2. Perlu sering diadakan musyawarah desa yang dihadiri Pemerintah Kecamatan/Kabupaten untuk menata kembali partisipasi politik masyarakat Desa Aek Bargot.
3. Mengupayakan agar para perantau yang berhasil dan berpendidikan tinggi untuk sekali-sekali pulang kampung memberikan motivasi dalam pembinaan persaudaraan/kebersamaan guna meningkatkan kesatuan dan persatuan diantara masyarakat Desa Aek bargot.

4. Tesis ini diharapkan bisa menjadi bahan kajian bagi para peneliti untuk melakukan kajian yang lebih mendalam lagi dalam konsentari yang sama maupun yang berbeda dari paradigma lain.

DAFTAR RUJUKAN

Abubakar, Suardi, dkk, 2005. *Kewarganegaraan: Menuju Masyarakat Madani*, Jakarta; Ghalia Indonesia.